



STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI KREATIF DI ERA SOCIETY 5.0

Asrini Habeahan

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Chacha Iqna Veby Tarigan

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Desryana Sinaga

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Devi Aulia

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Eva Arnel Silalahi

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Ledydiani Margareth Purba

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Rika Inriani Sinaga

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Prini Desima Evawani Ambarita

Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar

Alamat: Jl. Sangnawaluh No.4, Siopat Suhu, Kec. Siantar Tim., Kota Pematang Siantar,
Sumatera Utara

Korespondensi penulis: asrinipasaribu123@gmail.com, chachaiqnavebytarigan@gmail.com,
desryanasinaga91@gmail.com, deviaulia270@gmail.com, arnel766hi@gmail.com,
ledypurba2304@gmail.com, rikainrianisinaga@gmail.com, Priniambarita@gmail.com

Abstrak The rapid advancement of digital technology in the era of Society 5.0 has created significant opportunities for communities to actively participate in economic development driven by creativity and innovation. However, this digital transformation also presents critical challenges, such as digital literacy gaps, limited access to technology, and a lack of entrepreneurial capacity, particularly at the local level. This study aims to identify effective community empowerment strategies to support the growth of the creative economy in the Society 5.0 era. The research adopts a literature review approach by analyzing relevant sources on community empowerment, creative economy, and Society 5.0. The findings indicate that a comprehensive empowerment strategy should include digital literacy enhancement, local creative community strengthening, entrepreneurship education, and collaboration among government, private sector, and community stakeholders. These approaches are reinforced by participatory empowerment models and the utilization of digital technology as an accelerator of social and economic transformation. The study recommends integrating policies that support continuous training, creative business incubation, and the adoption of technology tailored to local needs to foster inclusive, competitive, and adaptive creative communities. Thus, community empowerment is not only a solution to bridge the digital divide but also a foundational element for sustainable creative economy development amid the complexities of the Society 5.0 landscape.

Keywords: Community empowerment, creative economy, digital literacy, Society 5.0, MSMEs, creative communities

Abstrak Perkembangan teknologi digital pada era Society 5.0 telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi. Namun, transformasi digital yang pesat juga menghadirkan tantangan serius, seperti kesenjangan literasi digital, keterbatasan akses teknologi, dan rendahnya kapasitas kewirausahaan masyarakat, khususnya di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di era Society 5.0. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menelaah literatur relevan mengenai pemberdayaan masyarakat,

ekonomi kreatif, dan Society 5.0. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan yang komprehensif mencakup peningkatan literasi digital, penguatan komunitas kreatif lokal, pendidikan kewirausahaan, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas. Pendekatan tersebut diperkuat dengan model pemberdayaan partisipatif dan penggunaan teknologi digital sebagai akselerator transformasi sosial dan ekonomi. Studi ini merekomendasikan integrasi kebijakan yang mendukung pelatihan berkelanjutan, inkubasi bisnis kreatif, serta adopsi teknologi berbasis kebutuhan lokal untuk menciptakan masyarakat kreatif yang inklusif, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukan hanya solusi terhadap ketimpangan digital, tetapi juga fondasi utama dalam membangun ekonomi kreatif berkelanjutan di tengah kompleksitas era Society 5.0.

Kata Kunci: *Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, literasi digital, Society 5.0, UMKM, komunitas kreatif*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat pada era Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan fase baru yang dikenal sebagai Society 5.0, sebuah konsep masyarakat masa depan yang berpusat pada manusia dengan dukungan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Internet of Things (IoT), dan big data. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Pemerintah Jepang dan kini menjadi wacana strategis global, termasuk di Indonesia. Society 5.0 mengusung integrasi antara dunia fisik dan dunia digital secara harmonis untuk menyelesaikan berbagai tantangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Keidanren, 2018). Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pelaku aktif dalam menciptakan nilai tambah berbasis inovasi dan kreativitas.

Salah satu sektor yang sangat relevan dengan semangat Society 5.0 adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang mengandalkan gagasan, kreativitas, dan inovasi sebagai sumber daya utama, bukan semata-mata komoditas fisik. Menurut Howkins (2001), ekonomi kreatif mencakup berbagai bidang seperti seni, desain, musik, kuliner, aplikasi digital, hingga permainan interaktif. Di Indonesia, ekonomi kreatif telah menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022) menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan membuka jutaan lapangan kerja. Namun demikian, potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara merata, terutama di tingkat komunitas lokal yang masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti akses terhadap teknologi, rendahnya literasi digital, dan minimnya dukungan ekosistem kreatif.

Dalam menghadapi kompleksitas perubahan sosial dan digital pada era Society 5.0, pemberdayaan masyarakat menjadi strategi yang sangat penting. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses multidimensional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam mengontrol sumber daya, mengambil keputusan, dan mengelola pembangunan secara mandiri (Chambers, 1995; Freire, 2005). Melalui strategi pemberdayaan yang tepat, masyarakat lokal dapat didorong untuk tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga produsen nilai

kreatif yang kompetitif secara global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai strategi-strategi pemberdayaan masyarakat yang kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak dalam kerangka pembangunan ekonomi kreatif di era Society 5.0.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan kunci: Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif di era Society 5.0? Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendekatan, prinsip, dan praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan transformasi digital serta dinamika ekonomi kreatif saat ini. Lebih dari sekadar analisis teoritis, studi ini juga berupaya menyajikan gagasan strategis yang dapat dijadikan acuan oleh para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Secara akademik, kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus ilmiah tentang sinergi antara teknologi, kreativitas, dan pemberdayaan sosial. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, program pelatihan, dan inisiatif komunitas dalam membangun masyarakat kreatif yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bukan hanya instrumen sosial, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan ekonomi kreatif dalam lanskap Society 5.0 yang semakin kompleks dan menantang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (literature review) sebagaimana dijelaskan oleh M. Sari dan Asmendri (2020), yang menekankan pada pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis berbagai literatur guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan dinamika ekonomi kreatif. Metode literature review memberikan landasan konseptual yang kuat bagi penulis untuk mengeksplorasi pentingnya ekonomi kreatif dalam konteks pembangunan masa kini dan masa depan, khususnya di tengah transisi menuju era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai potensi dan peluang pengembangan sektor ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda sebagai penggerak inovasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era Society 5.0 telah menciptakan transformasi besar dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, tidak semua kelompok masyarakat mampu mengikuti laju perubahan ini. Berdasarkan laporan We Are Social (2024), meskipun penetrasi internet Indonesia mencapai 77,7% dari total populasi, namun

kesenjangan literasi digital di antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih signifikan. Laporan Katadata Insight Center (2023) juga menunjukkan bahwa sekitar 42,5% pelaku UMKM di sektor ekonomi kreatif mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi digital karena keterbatasan pengetahuan, sarana, dan pelatihan. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan akses yang dapat menghambat potensi besar masyarakat untuk berkembang di sektor kreatif digital.

Lebih lanjut Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022) mengungkapkan bahwa sektor ekonomi kreatif menyumbang lebih dari 7,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan tenaga kerja yang terserap mencapai 23,9 juta orang. Namun, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 70% pelaku ekonomi kreatif berada pada level usaha mikro, yang umumnya belum memiliki dukungan teknologi, literasi pasar global, maupun akses pembiayaan yang memadai. Dalam konteks Society 5.0 yang menekankan integrasi teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan, hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat perlu didampingi dengan strategi pemberdayaan yang sistematis, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2023) mencatat bahwa hanya 35% dari penduduk usia produktif yang memiliki keterampilan digital dasar, dan angka ini lebih rendah lagi di daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Kondisi ini semakin memperkuat urgensi strategi pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada penguatan kapasitas digital, pengembangan kompetensi kreatif, dan akses terhadap platform teknologi yang relevan. Tanpa intervensi strategis, masyarakat berisiko tidak mampu berpartisipasi secara produktif dalam ekosistem ekonomi kreatif yang semakin terdigitalisasi, dan justru menjadi korban ketimpangan digital (digital divide) yang terus melebar.

Dengan demikian, strategi pemberdayaan masyarakat bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi merupakan prasyarat utama dalam memastikan partisipasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi kreatif di era Society 5.0. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya sebatas pelatihan teknis, melainkan harus menyentuh aspek literasi digital, kesadaran kreatif, kemitraan, dan ekosistem pendukung yang kolaboratif, agar masyarakat dapat mentransformasikan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi baru yang berbasis teknologi dan nilai budaya.

Pembahasan

Konsep Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang menekankan pentingnya kreativitas, keterampilan, dan bakat seseorang dalam menciptakan nilai tambah. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, ekonomi kreatif adalah kegiatan industri yang muncul dari kemampuan individu dalam menciptakan ide dan karya, yang dapat

meningkatkan kesejahteraan dan membuka peluang kerja. Artinya, kreativitas menjadi bagian utama dari proses ekonomi, mulai dari menciptakan ide, membuat produk, sampai cara menjualnya. Simatupang (2007) menyebutkan bahwa ekonomi kreatif merupakan industri yang berfokus pada pembuatan dan pemanfaatan karya yang memiliki hak kekayaan intelektual, seperti seni, film, permainan, desain fesyen, serta layanan kreatif seperti iklan. Jadi, ekonomi kreatif tidak hanya tentang produk seni, tetapi juga mencakup berbagai jasa yang memerlukan ide-ide orisinal dan cara berpikir inovatif.

Sementara itu, menurut John Howkins, ekonomi kreatif terdiri dari banyak sektor yang berbasis ide dan kreativitas, seperti periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, film, musik, pertunjukan, penerbitan, penelitian dan pengembangan (R\&D), software, mainan, televisi, hingga video game. Dalam pandangannya, produk yang bernilai dalam ekonomi kreatif bukan karena bahan bakunya, tetapi karena ide dan kreativitas yang ada di baliknya. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) juga menjelaskan bahwa ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang tumbuh dari kekuatan ide dan kreativitas, yang bisa mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Jadi, kreativitas bisa menjadi aset penting yang punya nilai jual dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kementerian Perdagangan Indonesia juga menyampaikan bahwa ekonomi kreatif adalah bagian dari pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berasal dari kreativitas, didukung oleh persaingan ekonomi yang sehat, serta memanfaatkan sumber daya yang bisa diperbarui. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif juga ikut menjaga keberlanjutan lingkungan dan memanfaatkan potensi lokal. Selain berdampak pada ekonomi, ekonomi kreatif juga membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

Orang yang kreatif bisa menjadikan ide mereka sebagai peluang usaha. Ini bisa membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, ide-ide yang terinspirasi dari budaya lokal juga bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi, yang memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia luar. Secara keseluruhan, ekonomi kreatif adalah sektor yang memadukan ide, teknologi, dan budaya dalam menghasilkan produk dan jasa yang inovatif. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi, ekonomi kreatif menjadi peluang besar bagi siapa saja yang mau berkreasi dan mencoba hal baru.

Society 5.0 dan Tantangannya bagi Masyarakat

Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat masa depan yang dirancang untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan Revolusi Industri 4.0 yang lebih menekankan efisiensi produksi melalui otomatisasi dan digitalisasi, Society 5.0 berupaya menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia, dengan menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan teknologi itu sendiri. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang dalam dokumen The 5th Science and Technology Basic Plan pada tahun 2016. Masyarakat 5.0 dianggap sebagai tanggapan atas berbagai permasalahan yang muncul dari era Society 4.0, seperti meningkatnya kesenjangan sosial, isolasi manusia akibat otomatisasi, dan ketimpangan akses terhadap manfaat teknologi. Dalam Society 5.0, teknologi tidak hanya digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara cerdas dan manusiawi.

Prof. Dr. Ir. Hammam Riza, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyampaikan bahwa Society 5.0 memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengakselerasi pembangunan berbasis inovasi dan memperkuat daya saing bangsa. Dalam sebuah webinar BRIN tahun 2021, beliau menyatakan, “Kita tidak bisa hanya berbicara tentang

digitalisasi. Kita harus menyiapkan SDM yang adaptif terhadap perubahan dan punya kemampuan menciptakan solusi berbasis teknologi.” Dalam pandangannya, Society 5.0 di Indonesia harus dikembangkan melalui pembangunan ekosistem digital dan penguatan riset nasional, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat inklusif yang tidak meninggalkan siapa pun. Secara historis, Society 5.0 merupakan fase kelima dalam perkembangan masyarakat manusia. Perjalanan ini dimulai dari Society 1.0, yaitu masyarakat berburu dan meramu yang hidup secara nomaden dan sangat bergantung pada alam. Lalu berkembang menjadi Society 2.0, yaitu masyarakat agraris yang mulai menetap dan bercocok tanam. Tahap berikutnya adalah Society 3.0, yakni masyarakat industri yang ditandai dengan penggunaan mesin dalam proses produksi. Selanjutnya muncul Society 4.0, yaitu masyarakat informasi yang memanfaatkan teknologi digital, komputer, dan internet secara masif dalam berbagai aspek kehidupan. Kini, Society 5.0 hadir sebagai masyarakat super-pintar (*super-smart society*) yang mengintegrasikan ruang fisik dan virtual melalui pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), *Big Data*, *Internet of Things (IoT)*, serta robotika untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.

Tujuan utama dari Society 5.0 bukanlah sekadar menciptakan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa teknologi harus bersifat inklusif, adil, dan memberdayakan, bukan mendominasi atau menggantikan peran manusia. Penerapan konsep Society 5.0 dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Di sektor kesehatan, teknologi seperti kecerdasan buatan (*AI*) dimanfaatkan untuk membantu diagnosis penyakit, sementara layanan *telemedicine* memungkinkan konsultasi medis dilakukan secara jarak jauh. Dalam bidang transportasi, kendaraan otonom dan sistem lalu lintas berbasis sensor mulai diterapkan guna meningkatkan keamanan dan efisiensi perjalanan. Di dunia pendidikan, pendekatan pembelajaran adaptif yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa semakin berkembang, disertai perluasan akses pendidikan melalui platform daring. Pada sektor pertanian, konsep *smart farming* diterapkan dengan menggunakan sensor tanah dan cuaca untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi kerja petani. Sementara itu, dalam pemerintahan, digitalisasi layanan publik melalui *e-governance* turut meningkatkan transparansi, efisiensi birokrasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, Society 5.0 menjadi jembatan antara kemajuan teknologi dan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Meskipun Society 5.0 menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam konteks masyarakat dan ekonomi lokal di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, dengan strategi yang tepat dan peluang yang tersedia justru dapat dimaksimalkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan.

1. Kesenjangan Akses Teknologi (Digital Divide)

Tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses yang merata terhadap teknologi. Di daerah terpencil, jaringan internet masih belum stabil, dan ketersediaan perangkat digital sangat terbatas. Hal ini memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Menurut Prof. Suhono Harso Supangkat dari ITB, transformasi digital masih belum menyentuh masyarakat di wilayah 3T (*tertinggal, terdepan, dan terluar*) secara optimal karena minimnya infrastruktur dan rendahnya literasi digital.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Society 5.0 menuntut keterampilan baru seperti pemrograman, literasi data, dan pemahaman etika digital. Sektor-sektor konvensional seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur masih didominasi oleh tenaga kerja yang belum akrab dengan teknologi

digital. Tanpa pelatihan yang memadai, SDM lokal akan kesulitan bersaing dan bisa tersisih dari arus perubahan.

3. Ketergantungan terhadap Teknologi dan Masalah Etika

Penggunaan AI dan otomatisasi dalam pengambilan keputusan dapat memunculkan isu seperti bias algoritma, keputusan yang tidak transparan, serta potensi pelanggaran privasi. Dalam konteks hukum dan kebijakan, Indonesia masih perlu memperkuat regulasi dan etika penggunaan teknologi canggih.

4. Disrupsi terhadap Pekerjaan Konvensional

Pekerjaan yang bersifat rutin dan manual berpotensi besar digantikan oleh mesin dan robot. Hal ini meningkatkan risiko pengangguran, terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Tanpa reskilling dan upskilling, transformasi digital dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi baru.

Peluang Strategis Society 5.0 bagi Ekonomi dan Masyarakat Lokal

1. Digitalisasi UMKM dan Ekonomi Kreatif

Pelaku usaha kecil menengah (UMKM) bisa memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar melalui e-commerce, sistem pembayaran digital, dan promosi via media sosial. Transformasi ini membuka jalan bagi UMKM untuk bersaing secara global tanpa harus memiliki toko fisik. Dr. Indrawan Nugroho menyebut bahwa dengan platform digital dan pendampingan yang tepat, UMKM Indonesia bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional di era Society 5.0.

2. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Sektor Lokal

Penggunaan teknologi seperti IoT di bidang pertanian memungkinkan petani mengetahui kebutuhan tanaman secara real-time, meminimalkan penggunaan pupuk berlebih, dan meningkatkan hasil panen. Begitu pula dalam industri perikanan atau manufaktur skala kecil, teknologi dapat memangkas biaya produksi dan meningkatkan daya saing.

3. Akses yang Lebih Merata terhadap Pendidikan dan Pelayanan Publik

Dengan adanya platform pembelajaran daring dan layanan publik digital, masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati kualitas layanan yang setara dengan di kota. Ini merupakan langkah penting untuk pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas masyarakat.

4. Peningkatan Partisipasi dan Transparansi

Digitalisasi pemerintahan mendorong partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan melalui sistem e-participation. Masyarakat bisa mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, hingga mengawasi kinerja pemerintah secara langsung.

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui penggalian potensi diri, kreativitas, pola pikir, serta tindakan masyarakat agar lebih baik dibandingkan sebelumnya. Menurut Widjaja (2002:77), pemberdayaan masyarakat berarti memberikan kewenangan atau otonomi kepada lapisan masyarakat bawah. Inti dari pemberdayaan ini adalah membangkitkan potensi yang dimiliki masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Pemberdayaan diharapkan dapat membuat daerah lebih mandiri dan mampu berdiri sendiri, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk memperlihatkan identitas dan berperan dalam membangun kesejahteraannya.

Sementara itu, Eko (2004:11) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses yang berkelanjutan dan bersifat gerakan sosial untuk mengembangkan potensi, meningkatkan partisipasi, serta mendorong kemandirian dan kemajuan peradaban masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, serta kesadaran masyarakat.

Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemberdayaan bermakna bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa diarahkan untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan warga melalui kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat agar mereka memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mandiri. Pemberdayaan ini menjadi strategi penting dalam memanfaatkan potensi masyarakat sehingga mereka mampu menjalankan kehidupan yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, setiap langkah pemberdayaan yang dilakukan pemerintah harus dilihat sebagai dorongan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai bidang agar terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta mampu membangun kehidupan yang lebih baik dan berdaya saing.

Model Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan di berbagai negara berkembang selalu menghadapi tantangan yang kompleks, sehingga diperlukan pendekatan yang beragam dan relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat. Salah satu pendekatan yang dianggap efektif adalah penggunaan model pemberdayaan masyarakat. Model ini berfungsi sebagai kerangka konkret dari hasil identifikasi dan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang menjadi sasaran program pembangunan. Model pemberdayaan tidak bersifat universal. Artinya, model yang diterapkan di suatu wilayah belum tentu sesuai untuk diterapkan di wilayah lain, meskipun menggunakan kerangka atau nama yang sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik sosial, geografis, dan kebutuhan lokal. Oleh karena itu, pemilihan model harus kontekstual dan fleksibel. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut adalah tujuh model pemberdayaan yang dapat diterapkan sesuai konteks dan kebutuhan:

1. Model Pembangunan Berbasis Masyarakat (Community-Based Development Model)

Model ini menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Prinsip utamanya mencakup partisipasi aktif, transparansi, keadilan sosial, serta kepemilikan lokal terhadap program. Melalui keterlibatan menyeluruh, masyarakat diharapkan mampu mengelola sumber daya, mengatasi masalah lokal, dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

2. Model Pendidikan Partisipatif (Participatory Education Model)

Model ini menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan mengakui kontribusi peserta didik berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lokal mereka. Metode ini meliputi diskusi, kerja kelompok, pemecahan masalah nyata, serta refleksi terhadap proses belajar itu sendiri.

3. Model Pemberdayaan Ekonomi (Economic Empowerment Model)

Fokus utama dari model ini adalah peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, pengembangan UMKM, hingga pembentukan koperasi, masyarakat dibekali untuk mandiri secara finansial. Pemberdayaan ini juga menekankan pengembangan infrastruktur penunjang dan kerja sama lintas sektor, termasuk kemitraan dengan pihak swasta.

4. Model Pemberdayaan Politik (Political Empowerment Model)

Model ini berupaya memperluas akses masyarakat terhadap ruang-ruang pengambilan keputusan politik. Melalui pendidikan politik, pembentukan kelompok advokasi, dan pemanfaatan teknologi informasi, masyarakat diberi pemahaman serta keterampilan agar mampu memperjuangkan hak-haknya dan berpartisipasi aktif dalam sistem politik. Terutama bagi kelompok marginal, model ini menjadi sarana untuk memperkuat posisi mereka dalam ranah kebijakan publik.

5. Model Pemberdayaan Sosial (Social Empowerment Model)

Pemberdayaan sosial diarahkan pada penguatan hubungan dan jaringan sosial masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan solidaritas, kepedulian kolektif, dan dukungan antaranggota komunitas. Kolaborasi antarpihak, peningkatan kapasitas individu, serta advokasi hak sosial menjadi bagian integral dalam menciptakan perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

6. Model Pemberdayaan Teknologi (Technological Empowerment Model)

Pemanfaatan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi (TIK), menjadi kunci dalam pemberdayaan masyarakat modern. Model ini mencakup identifikasi kebutuhan teknologi, pelatihan penggunaan, dan pemeliharaan sistem. Tujuannya adalah membuka akses terhadap informasi, layanan, pasar kerja, dan peluang pendidikan, sehingga masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman secara lebih inklusif dan efisien.

7. Model Pemberdayaan Lingkungan (Environmental Empowerment Model)

Pemberdayaan lingkungan merupakan upaya untuk mengajak masyarakat berperan aktif dalam pelestarian alam dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Melalui pendidikan lingkungan, pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi, serta pembangunan ekonomi berbasis lingkungan seperti ekowisata atau pertanian organik, masyarakat tidak hanya menjadi pelindung alam tetapi juga penerima manfaat langsung dari keberlanjutan lingkungan hidup.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses dinamis yang menempatkan komunitas sebagai subjek utama pembangunan. Setiap model memiliki karakteristik, pendekatan, dan fokus tersendiri, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, pendidikan, teknologi, hingga lingkungan. Dalam praktiknya, penerapan satu model secara tunggal sering kali tidak cukup. Oleh karena itu, integrasi beberapa model secara simultan menjadi strategi yang lebih efektif untuk menciptakan perubahan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan sesuai dengan realitas lokal. Pemerintah, lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan perlu merancang program pemberdayaan yang bersifat partisipatif, berbasis data lokal, dan menjunjung nilai-nilai keadilan sosial serta kearifan lokal. Hanya dengan cara itulah, pembangunan tidak hanya berlangsung secara fisik, tetapi juga bermakna bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Strategi pemberdayaan dalam mengembangkan kan ekonomi kreatif di Era Society 5.0

Hal ini merupakan konsep masyarakat yang berfokus pada manusia (*human-centered society*) dan didukung oleh pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI),

Internet of Things (IoT), big data, dan robotika untuk menyelesaikan berbagai tantangan sosial. Dalam konteks ini, ekonomi kreatif memiliki peran strategis karena menggabungkan kreativitas, inovasi, budaya, dan teknologi sebagai kekuatan penggerak ekonomi baru. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022) sebagai sektor ekonomi yang bertumpu pada ide, talenta, dan kreativitas manusia sebagai aset utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Untuk menghubungkan potensi ekonomi kreatif dengan perkembangan teknologi di Era Society 5.0 diperlukan strategi pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan.

1. Peningkatan literasi digital dan kewirausahaan

Hal ini merupakan dua aspek penting dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Literasi digital merujuk pada kemampuan seseorang dalam memahami, mengakses, dan menggunakan teknologi informasi secara efektif, etis, dan produktif. Dalam konteks saat ini, literasi digital tidak lagi hanya terbatas pada kemampuan teknis mengoperasikan perangkat, tetapi juga mencakup keterampilan berpikir kritis terhadap informasi digital, kemampuan berkomunikasi secara online, serta kemampuan untuk menciptakan dan berbagi konten digital yang bermakna. Ketika seseorang memiliki tingkat literasi digital yang baik, ia tidak hanya mampu menjadi pengguna teknologi, tetapi juga dapat memanfaatkannya untuk kegiatan yang bernilai, termasuk dalam pengembangan usaha.

Kewirausahaan adalah kemampuan dan keberanian seseorang untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan suatu usaha yang dapat memberikan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun sosial. Peningkatan kewirausahaan berarti membentuk individu yang tidak hanya memiliki ide kreatif, tetapi juga mampu mengeksekusi ide tersebut menjadi usaha yang nyata dan berkelanjutan. Dalam era digital, kewirausahaan menuntut pelaku usaha untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi, memiliki pemahaman terhadap pasar digital, serta mampu memanfaatkan platform-platform digital sebagai alat untuk memperluas jangkauan dan efektivitas bisnis. Menurut Gilster (1997), literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Pendapat ini diperkuat oleh Bawden (2001), yang menyatakan bahwa literasi digital bukan hanya soal keterampilan teknis, melainkan juga mencakup kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis dan menggunakannya secara

2. Penguatan komunitas kreatif lokal

Penguatan komunitas kreatif lokal adalah usaha untuk membantu dan mengembangkan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni, budaya, dan usaha kreatif di suatu daerah. Komunitas ini bisa terdiri dari seniman, pengrajin, desainer, penulis, musisi, atau pelaku ekonomi kreatif lainnya. Komunitas ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi daerah dan menjaga kekayaan budaya lokal. Untuk itu, perlu mendapat pelatihan, dukungan teknologi, akses pasar, dan kesempatan kerja sama. Menurut Hartley (2013), komunitas kreatif adalah bagian penting dari ekonomi modern menghasilkan ide-ide baru dan inovatif yang berasal dari kekayaan budaya lokal. Tidak hanya menciptakan produk, tetapi juga membawa perubahan sosial yang positif. Sementara itu.

Putnam (2000) menjelaskan bahwa komunitas yang kuat terbentuk karena adanya hubungan sosial yang saling percaya, bekerja sama, dan saling mendukung. Dalam komunitas kreatif, kerja sama ini sangat penting agar mereka bisa saling belajar dan tumbuh bersama. UNESCO (2019) juga menegaskan bahwa komunitas kreatif

memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Menciptakan lapangan kerja, melindungi budaya lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan komunitas kreatif perlu dilakukan secara serius, terutama di era Society 5.0, yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk kemajuan. Dengan demikian, penguatan komunitas kreatif lokal bukan hanya untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga jati diri budaya dan membentuk masyarakat yang mandiri, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

3. Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas

Konsep ini merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan tiga pihak penting dalam mendukung proses pembangunan. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengatur jalannya program, sektor swasta menyediakan dukungan berupa pendanaan, teknologi, serta efisiensi dalam pelaksanaan, sedangkan komunitas memberikan pengetahuan lokal, kebutuhan riil masyarakat, serta turut aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Menurut Brinkerhoff (2002), kemitraan seperti ini mencerminkan pembagian peran, tanggung jawab, dan manfaat yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama.

Lebih lanjut, Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menekankan bahwa keberhasilan kerja sama ini ditentukan oleh adanya rasa saling percaya, komitmen, serta komunikasi yang terbuka antar pihak. Di era Society 5.0, yang menekankan pemanfaatan teknologi dengan tetap menempatkan manusia sebagai pusat inovasi, kolaborasi antara ketiga pihak ini menjadi sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kemitraan ini tidak hanya penting, tetapi menjadi kunci dalam merancang solusi inovatif berbasis kolaborasi lintas sektor. Penggunaan Platform Digital dan Big Data untuk Mendukung UMKM Kreatif

4. Pendidikan, Pelatihan, dan Inkubasi Bisnis Kreatif

Di zaman sekarang, khususnya di era Society 5.0, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak cukup hanya tahu cara menggunakan teknologi seperti media sosial atau marketplace untuk memasarkan produk. Teknologi memang penting, tapi hanya menggunakan teknologi saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana pelaku UMKM benar-benar memahami cara kerja teknologi tersebut dan menggunakannya untuk mengembangkan usaha secara strategis. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan yang relevan sangat dibutuhkan. Melalui pendidikan, pelaku UMKM bisa meningkatkan pengetahuan dasar seperti cara mengelola keuangan usaha, memahami strategi pemasaran, dan mengetahui perkembangan tren pasar. Sementara itu, pelatihan dapat memberikan keterampilan praktis seperti membuat konten promosi digital, menggunakan aplikasi toko online, mengelola penjualan lewat e-commerce, dan menyusun laporan keuangan secara digital.

Namun, belajar teori saja juga belum cukup. UMKM juga perlu pendampingan langsung melalui program yang disebut inkubasi bisnis. Program ini biasanya memberikan bimbingan dari para ahli atau mentor bisnis secara langsung. Di dalamnya, pelaku UMKM dibantu untuk mengembangkan ide usaha, merancang strategi bisnis, mendapatkan akses ke permodalan, dan menjalin koneksi dengan pelaku bisnis lainnya. Ketiga hal ini pendidikan, pelatihan, dan inkubasi sangat penting karena kondisi pasar digital saat ini sangat cepat berubah dan penuh tantangan. UMKM harus bisa terus menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Tanpa bekal

pengetahuan dan pendampingan yang memadai, UMKM akan sulit bersaing dengan bisnis yang lebih besar dan lebih siap.

1. Pendidikan dan Pelatihan sebagai Sarana Peningkatan Kompetensi

Pendidikan dan pelatihan memainkan peran vital dalam membentuk pelaku UMKM yang melek digital dan inovatif. Sementara itu, Asmarawati et al. (2023) menambahkan bahwa pelatihan berbasis teknologi digital secara nyata membantu meningkatkan omset penjualan UMKM. Hal ini terjadi karena pelaku usaha menjadi lebih tepat sasaran dalam memasarkan produk, memanfaatkan platform digital, dan mengatur strategi penjualan. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan motivasi, pemahaman strategi pemasaran, dan kemampuan pelaku UMKM dalam membuat konten promosi yang sesuai dengan target pasar. Dengan kata lain, pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan kebiasaan kerja yang lebih produktif. Jadi, di era Society 5.0 ini, pelaku UMKM harus menjadi wirausaha yang cerdas, terbuka terhadap perubahan, dan terus belajar. Dengan begitu, mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh dan bersaing secara sehat di pasar yang semakin luas dan digital.

2. Inkubasi Bisnis sebagai Pendampingan Jangka Panjang bagi UMKM

Selain mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga membutuhkan bimbingan langsung dan berkelanjutan agar usaha mereka bisa benar-benar berkembang. Hal ini bisa diperoleh melalui program inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis adalah suatu bentuk pendampingan usaha yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan jangka panjang. Program ini biasanya melibatkan lembaga pendamping seperti universitas, pemerintah, atau swasta yang menyediakan fasilitas dan mentor bisnis. Dalam program inkubasi, UMKM tidak hanya mendapatkan teori, tapi juga bantuan langsung dalam mengembangkan usaha, mulai dari merancang ide bisnis, membuat strategi pemasaran, hingga menyusun manajemen keuangan dan operasional. Pelaku usaha juga bisa mendapat akses ke jaringan kerja sama, seperti koneksi dengan pemasok, konsumen, investor, dan mitra bisnis lainnya.

Selain itu, inkubasi juga bisa menjadi tempat belajar praktik langsung yang tidak selalu bisa didapat dari pelatihan biasa. Misalnya, dalam program inkubasi, pelaku UMKM bisa mendapat bimbingan personal dari mentor yang sudah berpengalaman, ikut workshop intensif, atau bahkan uji coba produk ke pasar melalui demo usaha. Dengan kata lain, inkubasi bisnis sangat penting untuk pelaku UMKM, terutama yang baru memulai atau ingin naik level, karena prosesnya tidak hanya membekali dengan ilmu, tetapi juga mendampingi secara nyata dalam membangun usaha yang profesional, berkelanjutan, dan siap bersaing di tengah tantangan era digital.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berdaya saing di era Society 5.0. Dalam era ini, teknologi seperti AI, IoT, dan big data harus dimanfaatkan secara inklusif dan berpusat pada manusia. Namun, tantangan besar seperti kesenjangan digital, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan akses teknologi masih membatasi potensi masyarakat, terutama di wilayah 3T. Strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif harus mencakup peningkatan literasi digital dan kewirausahaan, penguatan komunitas kreatif lokal, pendidikan dan pelatihan digital, pendampingan melalui inkubasi bisnis, serta kemitraan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas. Pemberdayaan ini tidak

hanya sebatas penguasaan teknologi, tetapi juga perlu menyentuh nilai-nilai budaya, identitas lokal, serta membangun jaringan sosial yang kuat.

Model-model pemberdayaan seperti pemberdayaan ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan perlu diintegrasikan sesuai konteks lokal agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi, tetapi juga pelaku aktif yang mampu menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berkelanjutan, ekonomi kreatif dapat menjadi sarana pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, serta penguatan identitas budaya dalam menghadapi tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Hidayat, R. (2021). *Pemanfaatan Big Data dalam Pengembangan UMKM di Era Digital*. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 1–10.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/download/1888/1707/7374>
- Asmarawati, E., Wardani, E. S., & Aprianda, B. (2023). *Peningkatan Omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Era Society 5.0 di UMKM Pamulang Estat*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Kreasi Mahasiswa Manajemen*, 3(3), 187–192.
<https://doi.org/10.32493/kmm.v3i3.33552>
- Helenan Thatcher Pakpahan., Siti Kurniawan., dkk (2024). *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Cv. Hel Publishing Indonesia
- Mustanir, A., Fariad, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat*. Global Eksekutif Teknologi, 7.
- Priyadi, Z. A., Dewi, I. R., & Wulandari, O. A. D. (2023). *Transformasi Digital dan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Ekonomi Kreatif Berkelanjutan di Era Society 5.0*. *EKRAF: Jurnal Ekonomi Kreatif dan Inovatif Indonesia*, 1(2), 84–90.
<https://nakiscience.com/index.php/ekraf/article/view/50>
- Rosmayati, S., Maulana, A., & Gunadi, T. (2024). *Peluang Dan Tantangan Ekonomi Bisnis Dan Kesehatan Di Era Society 5.0*. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v15i1.4124>
- Siregar, A. J., Savitri, D., Akbar, M. R., Iqbal, M., Zahra, A., & Wulandari, S. (2023). *Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM di Era Society 5.0*. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(6), 1646–1652.
- Tahar, A., Setiadi, P. B., Rahayu, S., Stie, M. M., & Surabaya, M. (2022). *Strategi pengembangan sumber daya manusia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 12380-12394.
- Utami, T., Purnomo, B., Estiana, R., Padilah, H., Harto, B., Judijanto, L., ... & Nurrohman, R. (2024). *UMKM DIGITAL: Teori dan Implementasi UMKM pada Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hWolEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA2&dq=info:JPzTwprEPtYJ:scholar.google.com/&ots=66JhCE40Ui&sig=fOaq2MZkmhBiaPgX_GB3XNw7-cc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Widjajanti, K. (2011). *Model pemberdayaan masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 12(1), 15-27.